



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

FAKULTAS
EKONOMI
DAN BISNIS

Volume 1
Tahun 2017

FEB UI

Research Update



Daftar Isi

PROFIL LEMBAGA PENELITIAN FEB UI 02

Lembaga Management FEB UI 03

Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI 03

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI 05

Lembaga Demografi FEB UI 06

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat FEB UI 07

KATALOG PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN FEB UI – JULI 2017 02

Lembaga Management FEB UI 10

Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI 26

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI 42

Lembaga Demografi FEB UI 46

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat FEB UI 49



PROFIL

LEMBAGA PENELITIAN

FEB UI

Didirikan pada tahun 1963, Lembaga Management (LM) pada awalnya merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Eksekutif yang diselenggarakan pada tahun 1959 yang disponsori oleh Ford Foundation dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam perkembangannya, lembaga ini kemudian banyak terlibat dalam berbagai proyek konsultasi manajemen, sehingga memperkokoh posisinya sebagai salah satu perusahaan jasa konsultasi manajemen terkemuka di Indonesia.

Sebagai perusahaan jasa konsultasi manajemen, keberadaan LM pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadi mitra perusahaan dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan manajemen, melalui penelitian, konsultasi serta pelatihan-pelatihan. Didukung oleh lebih dari 40 staf profesional, LM senantiasa siap untuk memberikan sumbangan berarti dalam memecahkan berbagai persoalan bisnis yang dihadapi, baik oleh perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia.

Pusat Pengembangan Akuntansi FEB UI

Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (*PPA FEB UI) didirikan oleh Dirjen Dikti dan pengelolaannya diserahkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 1988 dengan SK No. 53/DIKTI/Kep/1988. Tujuan penbenetukan PPA FEB UI pada awal pendiriannya adalah untuk meningkatkan pendidikan akuntansi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu PPA FEB UI juga memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi, keuangan, serta bidang-bidang terkait lainnya. Untuk memperkuat kompetensi di bidang penyelenggaraan jasa pelatihan dan konsultasi yang diberikan pada Juli 2009 dilakukan penggabungan antara PPA FEB UI dengan Laboratorium Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UI.

PPA FEB UI terdiri dari tiga divisi yakni divisi pelatihan regular, divide in-house training, workshop & seminar, serta divisi konsultasi dan kajian.

Visi

- Menjadi lembaga pelatihan kelas utama dalam penyelenggaraan persiapan ujian sertifikasi profesi yang terkait dengan bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pengauditan internal, sistem informasi, manajemen keuangan, perpajakan, manajemen risiko, tata kelola, dan tanggung jawab sosial dan bisnis.
- Menjadi lembaga pemberi jasa konsultasi dengan kekhususan bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pengauditan, sistem informasi, manajemen keuangan, perpajakan, manajemen risiko, tata kelola, dan tanggung jawab sosial dan bisnis.
- Menjadi lembaga pendukung Departemen Akuntansi, FEB UI, dan UI dalam melaksanakan penelitian.

Misi

- Menyelenggarakan pelatihan di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen risiko, tata kelola, dan bidang lain yang terkait, yang bersifat internasional, berkualitas tinggi, dan profesional.
- Memberikan jasa konsultasi di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen risiko, tata kelola, dan bidang lain yang terkait, secara profesional dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa.
- Melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan penelitian di Departemen Akuntansi FEB UI dan mempublikasikan hasil penelitian tersebut.
- Melakukan kegiatan yang mendukung dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf pengajar Departemen Akuntansi FEB UI pada khususnya dan staf pengajar FEB UI pada umumnya, sesuai dengan bidang kekhususannya masing-masing.

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) secara resmi berdiri pada 29 Januari 2007 di Depok. PEBS FEUI didedikasikan menjadi center of excellence untuk pusat penelitian dan pelatihan di bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai kebutuhan akademik, industri dan masyarakat.

PEBS FEUI bergerak di tiga aktivitas utama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yaitu: (i) pengembangan akademik untuk pendidikan tinggi formal; (ii) penelitian dasar dan terapan; serta (iii) pelatihan dan publikasi ilmiah. Dalam usianya yang relatif muda, PEBS FEUI telah terlibat aktif dalam wacana dan agenda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kegiatan seminar dan konferensi ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ke depan, FEUI dan PEBS FEUI terus berupaya membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi kampus-kampus, kampus-industri, serta kampus-regulator. Dalam upaya ini, PEBS FEUI akan berfokus pada analisa akademik dari isu-isu yang relevan di bidang yang terus tumbuh dan berkembang dengan pesat ini.



Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) didirikan pada 1 Agustus 1964 untuk menjawab pengaruh jumlah, komposisi dan pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Para pendiri LD FEB UI mempunyai visi ke depan bahwa aspek demografi atau kependudukan merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimasukkan dalam model pembangunan, khususnya di negara yang sedang berkembang. Pemikiran di bidang demografi dipadukan dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang.

Karenanya, dapat dikatakan bahwa LD FEB UI merupakan salah satu lembaga pertama dan pelopor yang membahas isu-isu kependudukan dikaitkan dengan pembangunan di Indonesia, sejak dasawarsa enampuluhan. Para pendiri LD FEB UI adalah Widjojo Nitisastro, N. Iskandar, Kartomo Wirosoehardjo, dan Kartono Gunawan.

Melalui pengalaman yang panjang tersebut, LD FEB UI telah membuktikan mampu memberikan sumbangan pemikiran nyata di bidang kependudukan, khususnya berupa pemikiran ilmiah dan penelitian, untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Sejak dimulainya Repelita I (1969-1974), LD FEB UI telah membantu pemerintah dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan GBHN. Bidang-bidang yang menjadi kajian pada saat itu antara lain Fertilitas dan Mortalitas, pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana oleh Pemerintah (BKKBN), Migrasi dan Transmigrasi, Perencanaan Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebijakan Kependudukan.

Mengikuti perpindahan kampus Fakultas Ekonomi (kini disebut Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Lembaga Demografi yang awalnya berlokasi di Salemba, Jakarta Pusat kini berlokasi di Kampus Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat.

Profile

Institute for Economic and Social Reserch – Faculty of Economics and Business, University of Indonesia or well-known as LPEM FEB UI, is a research institute under the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia as well as the largest community of academic researchers at the University of Indonesia. For more than 60 years, LPEM FEB UI has become one of the leading academic institutions in Indonesia, which plays an important role in contributing ideas through research, consulting, and education.

History

The establishment of a research center within the academic community at the Faculty of Economics, University of Indonesia is spearheaded by Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusomo. In 1952, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusomo, who was serving as the Dean of the Faculty of Economics, University of Indonesia, set up two research centers. They are called Seminar Business Administration and Social Research Center. The objective of establishing both research centers is to support the research activities by doctoral candidates. A year later, in November 1953, the Social Research Center was renamed as Institute for Economic and Social Research (LPEM FEB UI). In 1956, the Seminar Business Administration was merged into the LPEM FEB UI.

Activities

During its development, LPEM FEB UI plays an important role in research and educational activities. Most of their activities are collaboration with public or private entities, both within and outside the country. Government agencies or privates and foreign institutions who have become clients of LPEM for research activities namely: Bank Indonesia, Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Trade, Ministry of Industry, Toyota Astra Motor, Sucofindo, MEDCO Group, Indosat, Indonesia Media, Surveyor Indonesia, The World Bank, Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), The Asia Foundation, National Bureau of Economic Research (NBER), the Japan International Cooperation Agency (JICA), the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), United Nations Development Programme (UNDP), the International Labour Organization (ILO), the World Trade Organization (WTO), United Nations Children's Fund of Fund (UNICEF), and United States Agency for International Development (USAID).

As for education trainings, LPEM have several clients that include:

The National Development Planning Agency (Bappenas), the Secretariat General of the House of Representatives, the Regional Government of DKI Jakarta, The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG), and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In the last 35 years, LPEM FEB UI has completed more than 700 research activities in various fields. To adapt with new opportunities, LPEM has seven research groups:

- Industrial Economics and Infrastructure Research Group
- Regional and Energy Resources Policy Research Group
- Macroeconomics and Financial Sector Policy Research Group
- Environmental Economics Research Group
- Public Economics and Public Policy Research Group
- Poverty and Social Protection Research Group
- Social and Community Empowerment Research Group

Vision and Mission

- Our vision is to become a leading research institute in social and economic field that benefits society and conforms to good governance.

The missions of LPEM FEB UI are:

- To develop and maintain our best resource, which is our people, to conduct high quality research, consulting and training.
- To establish strong network and engage in good governance for the expansion of our multi-disciplinary field areas.
- To utilize decades of our experience to spread knowledge for effective public policies.

Core Values

- *Veritas* (Truth)
- *Probitas* (Uprightness)
- *Iustitia* (Justice)



KATALOG PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN FEB UI – JULI 2017

1. World Yearbook Competitiveness 2017 – IMD Switzerland

Pada tanggal 1 Juni 2017, IMD bersama Lembaga Management FEB UI merilis peringkat daya saing sejumlah negara termasuk Indonesia dalam publikasi “The 2017 IMD World Competitiveness Yearbook”. Indonesia tahun ini menduduki peringkat ke 42 dari total 63 negara yang dilakukan survey. Peringkat tersebut naik sebesar 6 poin dari tahun 2016, namun posisi peringkat tersebut masih dibawah pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada posisi 39 pada 2013 dan posisi 37 pada 2014.

2. Penyusunan Model Prediktif Pengelolaan Kredit Konsumen – Bank BUMN

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan risiko terjadinya kolektabilitas kredit yang buruk, antara lain : proses bisnis, para pihak yang terlibat (debitur, Bank, kondisi eksternal).

Komponen data yang dianalisis adalah merupakan data nasabah KPR baik subsidi dan non-subsidi pada beberapa wilayah yang telah ditentukan. Metode analisis yang digunakan adalah berupa analisis statistik prediktif yang meliputi: structural equation modelling, factor analysis, cluster analysis dan descriptive analysis.

Dari hasil tersebut diharapkan dapat ditemukan bentuk usulan *early warning* terhadap perilaku pembayaran yang mengarah kepada terjadinya kolektabilitas kredit yang buruk serta rekomendasi solusi yang terkustomisasi berdasarkan sumber masalahnya secara mendasar, sehingga permasalahan tidak terjadi berulang di masa mendatang.

3. Survei Pasar Pupuk Non Subsidi – BUMN Pupuk

Riset Pasar dilakukan untuk menganalisis informasi mengenai profil konsumen existing yang mencakup karakteristik demografi, psikografi, dan perilaku petani (perilaku menanam dan buying behavior). Selain itu untuk membangun strategi pemasaran, disertakan pula pembahasan mengenai bauran pemasaran (marketing mix), citra merek sumber informasi, sampai dengan pengetahuan dan sikap petani terhadap pupuk keluaran PT Petrokimia Gresik, yang dibandingkan dengan pesaing terdekat, serta juga digunakan *perceptual map* untuk menganalisis kedekatan produk pupuk merek Phonska Plus dengan beberapa merek yang ada di pasar ini. Tujuan dari kegiatan riset ini adalah (1) Mendapatkan *profile user* dari produk pupuk majemuk non subsidi: mencakup profil demografi, psikografi, dan *buying behavior*, (2) Menentukan faktor-faktor kunci penetrasi pasar di masing-masing daerah, (3) Membuat *perceptual map* dari *positioning* merek-merek pupuk majemuk non-subsidi yang beredar di ritel, dan (4) Membuat rekomendasi strategi pemasaran, strategi merek, dan strategi *positioning* dari produk pupuk majemuk non subsidi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terpandu menggunakan kuesioner persepsi dan profil penggunaan pupuk majemuk non-subsidi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Area wilayah survei yang diambil adalah wilayah sentra komoditi hortikultura di daerah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dengan luasan lahan minimal 0,1 Ha. Metode Sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan sampel adalah petani yang minimal sudah menggunakan pupuk non subsidi sebanyak 3 kali musim tanam.

4. Survei Kepuasan Pelanggan (Custody) – PT KSEI

Survey kepuasan pelanggan perusahaan supporting di Bursa Efek Indonesia yang menangani aspek custody dilakukan untuk mengukur dan mendapatkan masukan perbaikan dan peningkatan berkesinambungan atas pelayanan yang diberikan kepada Pemakai Jasa, sehingga dapat memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh Pemakai Jasa PT KSEI yang terdiri atas : Emiten, Anggota Bursa, dan Bank Kustodian. Penelitian ini meliputi evaluasi layanan yang didapatkan tahun lalu dan pemetaan kinerja layanan serta masukan dari para pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini didapatkan skor rating kepuasan pelanggan dan perbandingan kinerja layanan dengan tahun lalu.

Metode pengumpulan data antara lain (1) Kuesioner penilaian rating kinerja terhadap kelompok layanan, (2) Wawancara / *in-depth interview* terhadap sejumlah responden terpilih, dan (3) *Focus Group Discussion* untuk membahas prioritas isu layanan yang perlu diperbaiki serta penyusunan program rencana kerja tahun 2017.

5. Studi Persepsi Stakeholder & Evaluasi Program CSR – PT Berau Coal

Kegiatan studi persepsi stakeholder dilakukan untuk mengetahui persepsi stakeholder atas keberadaan dan aktivitas operasional PT Berau Coal yang melakukan pengelolaan kegiatan tambang batu bara. Tujuan dari kegiatan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui kontribusi program CSR Berau Coal dalam pembangunan Kabupaten Berau dari perspektif pengambil manfaat (beneficiaries) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Selain itu kegiatan penelitian ini juga digunakan untuk mengukur efektivitas program komunikasi Perusahaan dengan para stakeholder internal maupun eksternal Perusahaan, dan khususnya media serta untuk mendapatkan hubungan antara isu internal dan eksternal dengan reputasi perusahaan. Responden dalam penelitian antara lain adalah masyarakat yang bermukim di sekitar operasional tambang, pemerintah daerah beserta aparatur jajarannya di level masyarakat, serta media baik lokal maupun nasional.

Melalui penelitian diharapkan untuk mendapatkan (1) Hasil pengukuran persepsi per kelompok stakeholder, (2) Pemetaan tingkat kepentingan dan pengaruh dari masing-masing stakeholder yang ada, (3) Efektivitas pelaksanaan program CSR, dan (4) Analisis media framing terhadap pemberitaan media lokal dan nasional.

6. Survei AWP – PT KCI

Dalam rangka penetapan kebijakan tarif transportasi KRL, maka perlu dilakukan kajian terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi besaran penentuan tarif yaitu meliputi : kemampuan bayar / *affordability to pay* (ATP), kemauan membayar / *willingness to pay* (WTP) dan analisis perbandingan tarif terhadap moda transportasi lainnya melalui metode *point to point* (PTP) terhadap kompetitor dan moda substitusi.

Penelitian ini ditujukan untuk layanan KRL Jabodetabek untuk sejumlah relasi dan lokasi stasiun (Bogor, Jakarta Kota, Bekasi, Maja, Tanah Abang, Tangerang, Duri, dan Jatinegara). Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap pengguna layanan KRL yang sudah pernah menggunakan layanan tersebut minimum 6 bulan terakhir. Pengambilan sampel dibagi berdasarkan lokasi stasiun dan pengelompokan waktu penggunaan (hari kerja/libur, pagi/siang/malam).

Hasil dari kajian ini memperlihatkan tingkat penilaian pengguna jasa atas layanan yang disediakan (stasiun, kereta, fasilitas penunjang) dengan menggunakan pendekatan pengukuran *service performance* (*tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance*). Selain itu, hasil kajian ini juga menghasilkan rekomendasi kisaran tarif per relasi berdasarkan analisis ATP, WTP, dan PTP. Laporan analisis juga menyertakan hasil temuan terkait profil dan perilaku pengguna jasa layanan dalam memilih dan menggunakan layanan moda transportasi.

7. Survei Potensi KA Bandara Internasional Minangkabau – PT KAI

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam menyediakan layanan jasa transportasi yang aman dan nyaman, maka PT KAI berencana merealisasikan pembangunan jalur kereta api yang ditujukan untuk pengguna jasa / penumpang pesawat terbang yang melalui rute kota Padang hingga ke Bandara Internasional Minangkabau. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan minat calon penumpang terhadap moda transportasi KA Bandara serta analisis terhadap potensi perkembangan ekonomi daerah setempat.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner terhadap para penumpang pesawat udara berdasarkan kelompok moda transportasi yang telah ada yaitu : bus, kendaraan pribadi, taksi dan moda transportasi lainnya. Pengumpulan data ditujukan untuk menganalisis perilaku pengguna jasa dalam memilih moda transportasi saat ini serta seberapa besar minat pengguna jasa terhadap moda transportasi kereta api.

Hasil kajian memberikan masukan terkait potensi minat calon penumpang serta harapan terkait layanan/fasilitas yang perlu disediakan serta kisaran tarif yang dapat direkomendasikan berdasarkan analisis ATP, WTP dan PTP. Selain itu hasil kajian juga dilengkapi dengan analisis terkait potensi perkembangan ekonomi daerah yang antara lain meliputi perkiraan kondisi makro ekonomi, pertumbuhan sektor industri, serta pertumbuhan wisatawan.

8. Hubungan Pemodelan Perceived Philanthropic Citizenship, Corporate Brand Reputation, Brand Trust, Brand Commitment dan Brand Loyalty – Hibah ke Peneliti FEB UI

Penelitian ini merupakan program hibah LM UI kepada para peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penelitian ini melibatkan 4 BUMN lintas sektor yakni PT. Pertamina, PT KAI, PT Telkom, dan PT BRI dengan menggunakan survei dan kuesioner sebagai alat bantu (baik secara online melalui Google Form dan offline) yang diadaptasi dari Walsh dan Beatty (2007), Ekrmien dan Hancer (2015), dan Shukla et al (2016). Keseluruhan responden berjumlah 400 dengan rincian 100 responden untuk tiap BUMN. Responden yang dipilih adalah mereka yang berusia diatas 18 tahun, tinggal di wilayah Jabodetabek, dan pernah menggunakan layanan dari BUMN terkait sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan terakhir. Metode analisis yang digunakan yakni Structural Equation Modeling dengan bantuan SPSS dan PLS.

Penelitian ini memodelkan hubungan antara perceived philanthropic citizenship, corporate brand reputation, brand trust, brand commitment, dan brand loyalty pada konteks empat BUMN Indonesia. Melalui model hubungan antara philanthropy citizenship dengan corporate brand trust, corporate brand commitment, dan corporate brand loyalty tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada empat BUMN tadi. Implikasi manajerialnya adalah bagaimana keempat BUMN tersebut dapat membangun, memperbaiki, atau memperkuat reputasi mereka melalui program philanthropy citizenship yang mereka laksanakan yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, komitmen dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.

9. Restrukturisasi Perusahaan: Pembentukan Holding BUMN Pertambangan

Semakin terbukanya pasar domestik terhadap pasar asing telah memaksa perusahaan domestik untuk dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Perusahaan domestik harus berpikir strategis agar bisa lebih kompetitif, dapat meningkatkan skala ekonomis dan menguatkan *core competencies*. Bagi perusahaan besar yang melakukan diversifikasi konglomerasi, pembuatan holding adalah salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk dapat mensinergikan perusahaan.

Tujuan dari kajian ini adalah keinginan Pemerintah (kementrian BUMN) untuk memberikan gambaran dan rekomendasi mengenai opsi terbaik dari pembentukan holding perusahaan agar entitas yang tergabung di dalamnya dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, terarah dan dapat bersaing di pasar regional maupun global. Kajian ini juga bertujuan untuk menghitung *value* dari opsi holding terbaik kajian konsolidasi perusahaan. Adapun ruang lingkup kajian ini adalah beberapa perusahaan berikut anak perusahaannya dalam sebuah sektor yang sama yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dikaji selama ini telah beroperasi cukup lama dengan *coverage* operasi domestik dan internasional.

Dalam kajian ini, dilakukan *Comprehensive Due Diligence* dengan menganalisis berbagai aspek diantaranya organisasi & SDM, operasi, pemasaran, hukum, keuangan, pajak, dan aspek-aspek strategis pembentukan *holding company* lainnya. Untuk mendukung hal ini, maka kajian ini menganalisis baik data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan dari *interview* dan *focus group discussion*. Sedangkan data sekunder didapatkan dari data internal perusahaan dan anak perusahaan, serta data dari badan-badan yang terpercaya yang digunakan untuk menganalisis aspek eksternal.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat dua opsi holding, yaitu pembentukan *holding company* dengan membuat satu perusahaan baru sebagai induknya atau dengan menempatkan salah satu perusahaan yang dianalisis sebagai induk perusahaan. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan dari setiap aspek di atas maka dapat disimpulkan bahwa opsi kedua lebih baik daripada opsi pertama, yaitu dengan menempatkan salah satu perusahaan yang dianalisis sebagai induk perusahaan.

10. Kajian Supply Demand Housing Project

Sejalan dengan amanat yang terdapat dalam UUD 45 serta Program Pemerintah Nawacita, maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan. Percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan diwujudkan melalui pencanangan Program Sejuta Rumah secara serentak di 9 lokasi di seluruh Indonesia, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tantangan baik dari sisi *supply* rumah maupun sisi *demand*-nya. Berbagai perhitungan *backlog* perumahan pun digagas oleh beberapa badan pemerintah. Namun demikian, perbedaan metodologi dalam perhitungan *backlog* perumahan menyebabkan terjadinya kerancuan dalam menetapkan angka *backlog* perumahan yang dijadikan sebagai basis dalam mengukur target pencapaian program percepatan pembangunan perumahan. Untuk itu, diperlukan data dan informasi yang akurat terkait kondisi *supply* dan *demand* sektor perumahan, serta regulasi terkait.

Tujuan dari kajian ini , seperti yang dinyatakan oleh Konsorsium Bank BUMN sebagai *User* , antara lain: untuk menjelaskan kondisi *supply* dan profil *demand* perumahan di Indonesia secara umum; memberikan rekomendasi penentuan strategi percepatan pemenuhan perumahan bagi Pemerintah maupun para *stakeholder* perumahan; dan menyajikan data potensi ketersediaan rumah 15 tahun ke depan, dengan kondisi seperti saat ini dan dengan kondisi setelah ada upaya percepatan. Lingkup kajian ini adalah 34 provinsi seluruh Indonesia, yang meliputi 510 Kabupaten/Kota.

Kajian ini menggunakan metode olah data deskriptif dengan menggunakan data primer maupun sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan Focus Group Discussion dengan pihak pemerintah daerah, pengembang dan perbankan. Sedangkan data sekunder adalah dengan menggunakan data yang disediakan oleh badan-badan pemerintah yang terpercaya dan data dari pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat sebuah pulau yang memiliki *backlog* paling besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Pemerataan pembangunan perumahan menjadi hal krusial sehingga wilayah pemukiman diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah ini saja. Pembangunan wilayah pemukiman di pulau-pulau lainnya akan mendorong pemerataan aktivitas ekonomi secara nasional sehingga ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dikurangi. Sedangkan, berdasarkan hasil pemetaan, solusi permasalahan *backlog* perumahan dapat diklasifikasi menjadi empat strategi besar, yakni: *prioritizing*, *maintaining*, *accelerating*, dan *expanding*. Keempat strategi ini disesuaikan dengan kondisi *surplus* atau defisit lahan permukiman saat ini, serta proyeksi kebutuhan rumah di masa depan.

11. Human Resources Strategic Plan

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan seluruh fase pengembangan perusahaan. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengelola SDM akan menimbulkan kegagalan bagi seluruh rencana yang terkandung dalam rencana jangka panjang perusahaan. Sebagai salah satu langkah dalam membangun SDM sesuai yang diinginkan dan diharapkan perusahaan, maka perlu dilakukan kajian mengenai Rencana Strategis Bidang SDM yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi dengan rencana jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, diharapkan Rencana Strategis Bidang SDM dapat mendukung pencapaian target-target dalam rencana jangka panjang perusahaan. BUMN seperti pengelola listrik, industri pupuk, industri keuangan non bank membutuhkan jasa ini untuk memperkuat daya saingnya.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah interview, *focus group discussion*, dan review terhadap dokumen & data internal yang dianalisis secara kualitatif. Analisis yang dilakukan diperkaya dengan konsep manajemen sumberdaya manusia, kondisi pasar & makroekonomi serta *benchmarking* terhadap perusahaan sejenis. Interview dan *focus group discussion* dilakukan untuk menggali permasalahan strategik yang harus diselesaikan dengan cepat. Review terhadap dokumen terkait dan data internal maupun eksternal dilakukan untuk melihat kemampuan perusahaan dan peluang perusahaan di pasar. Semua informasi yang didapatkan dari aktivitas di atas kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan rencana strategik yang dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan, baik dalam hal penguatan SDM secara kuantitas maupun secara kualitas. Lebih jauh, kajian ini juga melihat apakah struktur organisasi saat ini sudah cukup baik dalam menangkap peluang di pasar. Kemudian juga dilihat apakah karir sudah dibuatkan sistem yang mendukung dan dapat memotivasi kinerja pegawai.

Kesimpulan dari hasil kajian ini adalah perusahaan masih terbuka untuk melakukan perbaikan dalam banyak hal. Pertama, untuk mengembangkan struktur untuk dapat mencapai rencana jangka panjang perusahaan. Kedua, perusahaan harus melakukan *retaining and development* terhadap pegawai untuk menekan tingkat *turnover* yang besar. Ketiga, sistem karir dinilai perlu diperbaiki dengan mengutamakan promosi pegawai dari internal. Terakhir, perusahaan juga perlu mengembangkan sistem *knowledge management* yang dapat meningkatkan kualitas pegawai agar memiliki efektivitas yang tinggi.

12. Analisis Potensi Pasar

Pengembangan bisnis adalah sesuatu hal yang wajib bagi sebuah perusahaan. Pengembangan bisnis ini merupakan jawaban atas tantangan-tantangan yang muncul. Hal ini dapat terjadi pada semua perusahaan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian yang dapat mengetahui potensi-potensi pasar baru agar dapat dijadikan target perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Bagi industry perbankan, pemahaman atas updates perkembangan industry di seluruh propinsi dan Kabupaten/Kota adalah kebutuhan mutlak. LM FEB UI menjadi fasilitator untuk melaksanakan riset tersebut. Oleh karena itu, kajian ini mencoba untuk melakukan pemetaan potensi pasar baru sebagai dasar kebijakan dalam pengembangan bisnis. Pemetaan ini dilakukan dengan cara menggunakan data-data makroekonomi seperti PDB, PDRB, arus komoditas, dan data *focus group discussion* untuk mengetahui tren-tren industri yang mengalami pengembangan dan mempunyai prospek kedepannya.

Cakupan dari kajian ini adalah 34 propinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Analisisnya bersifat kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih baik. Analisis kuantitatif didapatkan dari data sekunder dari berbagai sumber yang terpercaya, sedangkan analisis kualitatif didapatkan dari interview dan *focus group discussion* terhadap pelaku dan pengamat industri yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai industri terkait.

Kajian ini sendiri menggunakan beberapa pendekatan dalam melakukan analisis pasar. Pertama, melakukan analisis dengan menggunakan data PDB dan PDRB untuk melihat komoditas yang dinilai potensial. Kedua, melakukan analisis dengan menggunakan data arus komoditas untuk melihat pergerakan barang dan titik mana saja yang dapat dijadikan hub oleh perusahaan. Ketiga, melakukan analisis dengan menggunakan data dari narasumber atau ahli BUMN sehingga dapat mengenali pasar BUMN yang berpotensi untuk dilakukan kerjasama.

Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat komoditas tertentu yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi dan stabil dibandingkan dengan komoditas lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa komoditas ini kedepannya akan dapat menjadi potensi pasar baru yang bisa digarap oleh perusahaan. Selain itu, beberapa propinsi juga dinilai memiliki potensi sebagai hub dikarenakan aktivitas pergerakan barangnya yang cukup tinggi. Hasil lainnya adalah masih banyak perusahaan BUMN yang memiliki potensi untuk diajak bekerjasama, walaupun secara kesehatan perusahaan kurang meyakinkan.

13. Human Resources Audit

Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas perusahaan, karena merupakan penggerak agar perusahaan dapat terus beroperasi. Kemampuan bersaing organisasi dapat dicapai melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga SDM yang dimiliki mampu menciptakan *competitive advantage*. Pengelolaan SDM harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan (Preffer, 1995) sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai *competitive advantage* atas para pesaingnya (Singh, 2010; Chen, 2010). HR Audit merupakan suatu proses meninjau (review) secara komprehensif suatu sistem dan/atau proses suatu organisasi apakah sudah memenuhi kebutuhan atau proyeksi masa depan kebutuhan fungsi SDM organisasi. HR Audit akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi bagian SDM yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Kajian ini bertujuan untuk melakukan audit terhadap strategi dan sistem SDM, kompetensi dan impact. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi area improvement yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan besar seperti pengelola utilitas membutuhkan jasa ini untuk meningkatkan produktivitas SDM. LM FEB UI menjadi fasilitator konsultan yang membantu kebutuhan perusahaan tersebut.

Metode yang digunakan dalam kajian ini terbagi atas empat hal, yaitu *Interview*, *Document Review*, Observasi dan Kuesioner. Interview dilakukan terhadap para manajer di bawah direksi. Adapun dokumen yang diperlukan adalah yang berkaitan dengan kondisi pengelolaan SDM saat ini. Observasi dilakukan dengan melihat kondisi pengelolaan SDM di lapangan. Sedangkan kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan SDM yang sudah dilakukan.

Data yang digunakan adalah data primer yang dipadukan dengan data sekunder. Jenis analisis yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menambahkan benchmarking pada perusahaan sejenis di industri terkait atau yang mendekati. Hal ini digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan yang faktual.

Hasil dari kajian ini adalah perusahaan harus dapat mengimbangi antara pertumbuhan bisnis dengan kuantitas dan kualitas SDM yang mendukung bisnis secara keseluruhan. Hal ini menjadi penting karena pengadaan kuantitas dan kualitas SDM yang diperlukan dinilai belum optimal sehingga perlu menjadi perhatian bagi perusahaan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan kompensasi, penilaian kerja, dan jalur karir. Selain itu, Departemen SDM harus mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai *partner* bisnis dengan membangun strategi dan sistem yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.

14. Evaluasi Kerjasama Bisnis

Perusahaan A telah memulai kerjasama dengan perusahaan B sejak puluhan tahun yang lalu dimulai dengan sebuah produk. Produk tersebut berevolusi dan bertambah, hingga saat ini kerjasama tersebut mengelola dua produk utama. Setelah sekian lama bekerjasama, tidak diperoleh perkembangan yang signifikan baik dari sisi pertumbuhan pendapatan, kontribusi pendapatan terhadap total pendapatan maupun aspek lainnya. Untuk itu, diperlukan kajian ini untuk mengevaluasi kerjasama tersebut. Sinergi BUMN adalah prioritas yang dikembangkan pemerintah saat ini. Kebutuhan industri Perbankan untuk memahami kerjasama dengan sejawatnya di industri Pos perlu dipertajam. Tugas ini dikerjakan LM FEB UI untuk memastikan value creation yang lebih tinggi bagi BUMN. Kajian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, memperoleh overview kerjasama bisnis perusahaan A dan B yang dilihat dari sudut pandang nasabah & perusahaan A. Selain itu, kajian ini ingin memperoleh overview efektivitas kerjasama yang selama ini berjalan. Terakhir, kajian ini bertujuan untuk menggali informasi atas bisnis eksisting dan potensi kerjasama lain yang dapat dilakukan antara kedua perusahaan.

Kajian ini menggunakan dua jenis data dalam pengerjaannya. Pertama, data primer yang di dapatkan dari hasil FGD, *mystery shopping*, dan observasi kepada para nasabah dan pegawai perusahaan. Pencarian data ini dilakukan pada cabang atau outlet terkait yang dinilai dapat merepresentasikan cabang lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Kedua data sekunder yang di dapatkan dari hasil kinerja keuangan dan perjanjian kerjasama selama ini. Lebih jauh, kajian ini juga menggunakan metode analisis model bisnis canvas dan analisis keuangan dalam melakukan evaluasi kerjasama tersebut.

Evaluasi kerjasama ini dinilai dengan menggunakan beberapa variabel pemasaran seperti produk, place, promotion, dan price. Sedangkan dimensi penilaiannya terbagi atas empat, yaitu *Process*, *Satisfaction*, *People & Customer Services* (*Mystery Shopping* dan *Observasi*), dan *Physical Evidence* (*Mystery Shopping* dan *Observasi*). Kedua jenis penilaian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi produk dan layanan perusahaan.

Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa kerjasama antara perusahaan A dan B masih bisa untuk dilanjutkan karena dinilai masih layak. Lebih jauh, besaran *revenue sharing* kedua perusahaan perlu diperlebar sehingga dapat memberikan hasil yang optimal kedepannya. Kedua perusahaan juga dinilai perlu lebih gencar dalam melakukan *cross selling* untuk meningkatkan jumlah *revenue*. Terakhir, perlu adanya insentif yang dapat diberikan kepada petugas lapangan agar lebih termotivasi dalam melakukan penjualan.

1. IHT CIA Review – PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Pada tanggal 10 Februari s.d. 8 April 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan *In-House-Training* (IHT) CIA Review bagi staf/karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. CIA Review adalah pelatihan yang didesain untuk membantu para peserta mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi internasional bidang audit internal. CIA merupakan sertifikasi bertaraf internasional sebagai pengakuan atas integritas, profesionalisme, dan kompetensi pemegangnya di bidang audit internal. CIA review juga didesain untuk memutakhirkan pengetahuan peserta tentang perkembangan praktik di bidang audit internal. Materi IHT CIA Review mencakup materi ujian yaitu *Internal Audit Basics*, *Internal Audit Practice*, dan *Internal Audit Knowledge Elements*. IHT CIA Review ini melibatkan staf pengajar FEB UI serta praktisi di bidang internal audit yang telah menyandang sertifikasi CIA. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan *active lecturing* dengan membahas *problem set* serta diakhir dilakukan *tryout* untuk melatih peserta sebelum mengikuti ujian CIA.

2. IHT Finance & Accounting untuk Audit Internal – PT. Astra International Tbk

Pada tanggal 7-13 Februari 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan *In-House-Training* (IHT) *Finance & Accounting* bagi staf/karyawan PT. Astra International Tbk. Pelatihan ini ditujukan untuk membekali peserta dengan: (1) pemahaman terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan; (2) teknik analisis laporan keuangan; (3) wawasan mengenai potensi *creative accounting*; (4) konsep pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi; serta (5) dasar-dasar akuntansi biaya, analisis titik impas, serta penyusunan anggaran. Pelatihan melibatkan staf pengajar FEB UI yang memiliki keahlian, sertifikasi, dan pengalaman di bidang terkait. Metode pembelajaran dimulai dengan *pre test* untuk mengetahui latar belakang pengetahuan peserta, penyampaian materi yang disertai dengan contoh-contoh terapan, latihan soal dan studi kasus, serta *post test* untuk mengukur pencapaian tujuan pelatihan.

3. IHT Financial Development Program Level 2 – PT. Golden Energy Mines Tbk

Pada tanggal 20-24 Maret 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan *In-House-Training* (IHT) Financial Development Program Level 2 untuk PT. Golden Energy Mines Tbk. Pelatihan ini didesain untuk membantu Perusahaan dalam mempersiapkan sekaligus menseleksi talenta terbaik yang dimiliki Perusahaan untuk mengikuti sertifikasi di bidang keuangan dan akuntansi manajemen. Talenta-talenta terbaik tersebut akan diikutsertakan dalam ujian sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan *Certified Professional Management Accountant* (CPMA). Oleh sebab itu pelatihan ini melibatkan staf pengajar FEB UI dan praktisi yang telah memiliki sertifikasi CFA atau CPMA. Materi pelatihan mencakup *Economics, Corporate Finance and Investment, Financial Accounting, serta Cost Accounting dan Management Accounting*. Pembelajaran dilakukan dengan penyampaian materi serta pembahasan ilustrasi dan kasus.

4. IHT Financial Modeling – PT. Danareksa (Persero)

Pada tanggal 2 s.d 7 Maret 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan *In-House-Training* (IHT) *Financial Modeling* bagi staf/karyawan PT. Danareksa (Persero). IHT ini didesain untuk: (1) melatih peserta untuk menyusun model keuangan dengan menggunakan data keuangan perusahaan yang berguna bagi perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan; (2) memberikan dan membekali peserta dengan kemampuan pemograman excel terapan yang dapat diandalkan dalam mengatasi berbagai masalah kuantitatif dalam bisnis; (3) memberikan pemahaman kepada peserta tentang *tools* untuk menghasilkan solusi optimal dan *goal seeking* dalam *worksheet*; (4) membekali peserta dengan teknik membuat model yang efektif yang memudahkan peserta dalam pengambilan keputusan keuangan dan keputusan strategis; serta (5) memberikan peserta kemampuan untuk memeriksa akurasi model dan memperbaiki kekurangan yang timbul (*audit & debug*). Instruktur yang terlibat dalam pelatihan ini adalah staf pengajar FEB UI dan praktisi yang memiliki keahlian mumpuni dalam *financial modeling*. Metode pembelajaran yang digunakan adalah praktik langsung sehingga setelah pelatihan peserta dapat langsung menggunakannya dalam keseharian.

5. IHT Perpajakan Brevet A&B + e-SPT – PT. Kinarya Selaras (Telkomsel Area Makasar)

Pada tanggal 17 April s.d. 21 Mei 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan *In-House-Training* (IHT) Perpajakan Brevet A&B + e-SPT bagi staf/karyawan PT. Telkomsel Area Makasar (melalui event organizer PT. Kinarya Selaras). IHT Brevet adalah respon Perusahaan terhadap PMK No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak & Kewajiban Seorang Kuasa, yaitu seorang Kuasa harus menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak. Oleh sebab itu pelatihan ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Pelatihan ini memberikan bimbingan praktis kepada peserta mengenai cara pengisian SPT Form 1770 (PPh Pribadi), 1771 (PPh Badan), 1721 (PPh Potong-Pungut), dan SPT 1107 (PPN/PPNBM) dan SSP, serta aplikasi e-SPTnya. Instruktur yang terlibat adalah staf pengajar FEB UI serta praktisi perpajakan. Metode pembelajaran bersifat *active lecturing* serta pemberian materi disertai dengan contoh penerapannya. Materi pelatihan mengacu pada silabus USKP.

6. IHT Peningkatan Kompetensi Akuntansi dan Keuangan – PT. Astra Otoparts Tbk

Mulai 18 Mei s.d. 25 Oktober 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan IHT peningkatkn kompetensi akuntansi dan keuangan bagi staf/karyawan PT. Astra Otoparts Tbk. Pelatihan terdiri dari beberapa *batch* dan mencakup topik Akuntansi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Keuangan, Manajemen Investasi, Perpajakan, Hukum Bisnis, Manajemen Risiko, dan Manajemen Strategik. Tujuan pelatihan adalah membekali peserta dengan pemahaman mengenai: (1) biaya produksi, penyusunan anggaran, dan biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan; (2) teknis analisis laporan keuangan serta wawasan mengenai potensi *creative accounting*; (3) penganggaran modal; (4) konsep dasar manajemen investasi serta karakteristik instrumen investasi; (5) aturan perpajakan yang relevan bagi perusahaan; (6) hukum bisnis terkait pendirian dan pembubaran perusahaan; (7) manajemen risiko di bidang keuangan; serta (8) konsep dasar manajemen strategik. Instruktur yang terlibat adalah staf pengajar FEB UI serta praktisi yang ahli dibidangnya. Metode pembelajaran mencakup *pre test* untuk mengetahui latar belakang pengetahuan peserta, penyampaian materi yang disertai dengan contoh-contoh terapan, latihan soal dan studi kasus, serta *post test* untuk mengukur pencapaian tujuan pelatihan.

7. IHT Customs, Excise, and Export-Import Regulation – PT. Mistubishi Corporation Indonesia

Pada tanggal 19 dan 23 Mei 2017, PPA FEB UI menyelenggarakan *In-House-Training (IHT) Customs, Excise, and Export-Import Regulation* bagi staf/karyawan PT. Mistubishi Corporation Indonesia. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang peraturan, prosedur, metode, perizinan, fasilitas dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan kepabeanan serta ekspor-impor. Instruktur pelatihan adalah praktisi di bidangnya. Materi pelatihan mencakup Klasifikasi Barang (HS Code), Nilai Pabean, Prosedur Impor, Prosedur Ekspor, dan Fasilitas Kepabeanan.

8. IHT CPSAK Review – PT. Astra International, Tbk.

Mulai tanggal 16 Juni 2017, PPA FEB UI kembali menyelenggarakan *In-House-Training* (IHT) CPSAK Review untuk para staf/karyawan PT. Astra International Tbk. CPSAK Review adalah pelatihan yang didesain untuk membantu para peserta mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi PSAK yang diselenggarakan oleh IAI. CPSAK Review juga didesain untuk memutakhirkan pengetahuan peserta tentang standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku di Indonesia. IHT CPSAK Review ini melibatkan staf pengajar FEB UI serta praktisi di bidang akuntansi keuangan yang telah menyangand sertifikasi CPSAK. Metode pembelajaran bersifat *active lecturing* dan pemberian materi oleh instruktur disertai dengan pembahasan soal latihan, selain *pre-test* di awal dan *post-test* di akhir pelatihan. Pelatihan ini diperkirakan berakhir pada tanggal 22 November 2017.

9. Pelatihan Reguler Brevet AB + e-SPT

Pada periode Februari s.d. Juni 2016, PPA FEB UI menyelenggarakan pelatihan reguler Brevet AB + e-SPT. Pelatihan ini telah lama diselenggarakan oleh PPA FEB UI dan pada periode s.d. Juni 2016 memasuki angkatan ke-65 s.d. 68. Lokasi pelatihan diselenggarakan di Depok dan Salemba. Pelatihan Brevet AB + e-SPT ini sangat penting ditempuh mengingat PMK No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak & Kewajiban Seorang Kuasa, menyatakan bahwa seorang Kuasa harus menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak.

Oleh sebab itu pelatihan ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Pelatihan ini memberikan bimbingan praktis kepada peserta mengenai cara pengisian SPT Form 1770 (PPH Pribadi), 1771 (PPH Badan), 1721 (PPH Potong-Pungut), dan SPT 1107 (PPN/PPNBM) dan SSP, serta aplikasi e-SPTnya. Instruktur yang terlibat adalah staf pengajar FEB UI serta praktisi perpajakan. Metode pembelajaran bersifat *active lecturing* serta pemberian materi disertai dengan contoh penerapannya. Materi pelatihan mengacu pada silabus USKP.

10. Pelatihan Reguler Perpajakan Brevet C

PPA FEB UI telah dan sedang menyelenggarakan Pelatihan Reguler Perpajakan Brevet C angkatan 19 pada periode 4 Maret s.d. 10 Juni 2017. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari Pelatihan Brevet AB. Setelah mengikuti pelatihan Brevet C, peserta diharapkan memiliki pemahaman atas UU Perpajakan dan peraturan pelaksanaanya. Selain itu peserta juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang Akuntansi Perpajakan, Perpajakan Internasional, serta Tax Planning. Materi pelatihan Brevet C mencakup: (1) Pajak Penghasilan Orang Pribadi; (2) KUP/BPSP Akuntansi Perpajakan; (3) Perpajakan Internasional; (4) Pajak Penghasilan Badang; dan (5) Tax Planning. Instruktur adalah tim pengajar dan praktisi yang ahli dibidangnya.

11. Pelatihan Reguler Akuntansi Keuangan dan Komputer Akuntansi

PPA FEB UI telah dan sedang menyelenggarakan Pelatihan Reguler Akuntansi Keuangan dan Komputer Akuntansi untuk angkatan 45, 46, dan 47. Pelatihan ini dibuat berjenjang untuk menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan keuangan secara manual maupun terkomputerisasi. Selain itu, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami perlakuan dan metode akuntansi yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi di Perusahaan. Peserta juga diharapkan dapat melakukan analisis laporan keuangan. Pelatihan ini tidak hanya tepat untuk staf akuntansi, melainkan juga untuk pengacara, dokter, pengusaha UMKM yang berkepentingan untuk memahami pelaporan keuangan baik secara manual maupun terkomputerisasi. Instruktur pelatihan adalah staf pengajar FEB UI yang memiliki pengalaman praktik. Setiap sesi pelatihan mencakup fase orientasi, latihan, serta umpam balik. Materi pelatihan mencakup Komputer Akuntansi, Perusahaan Jasa, Perusahaan Dagang, Akuntansi kKas dan Bank, Akuntansi Piutang dan Wesel Tagih, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap, Liabilitas Lancar & Liabilitas Jangka Panjang, Saham dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, Analisis Laporan Keuangan, dan Komputer Akuntansi.

12. Pelatihan Reguler Akuntansi Manajemen

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah dan sedang menyelenggarakan Pelatihan Reguler Akuntansi Manajemen Angkatan 3. Pelatihan Akuntansi Manajemen merupakan kelanjutan dari pelatihan Akuntansi Biaya. Pelatihan ini ditujukan kepada masyarakat umum yang ingin memahami manfaat akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Pelatihan ini akan membahas topik-topik akuntansi manajemen yang relevan dan sering digunakan oleh pihak internal perusahaan, terutama oleh manajemen, dalam membuat keputusan bisnis.

Pelatihan akan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang penyusunan anggaran, analisis biaya untuk pengambilan keputusan, dan pengukuran kinerja. Materi pelatihan mencakup anggaran induk, anggaran kas, analisis varian, analisis biaya untuk pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, dan *pricing decision*. Pelatihan ini ditujukan untuk pimpinan dan staf bagian akuntansi dan keuangan, manajer non-keuangan dengan tanggung jawab atas keuntungan perusahaan, wirausahawan, dan lainnya.

13. Pelatihan Reguler Financial Modeling

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler Financial Modeling Angkatan 33 dan 34. Pelatihan ini didesain untuk: (1) melatih peserta untuk menyusun model keuangan dengan menggunakan data keuangan perusahaan yang berguna bagi perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan; (2) memberikan dan membekali peserta dengan kemampuan pemograman excel terapan yang dapat diandalkan dalam mengatasi berbagai masalah kuantitatif dalam bisnis; (3) memberikan pemahaman kepada peserta tentang *tools* untuk menghasilkan solusi optimal dan *goal seeking* dalam *worksheet*; (4) membekali peserta dengan teknik membuat model yang efektif yang memudahkan peserta dalam pengambilan keputusan keuangan dan keputusan strategis; serta (5) memberikan peserta kemampuan untuk memeriksa akurasi model dan memperbaiki kekurangan yang timbul (*audit & debug*). Instruktur yang terlibat dalam pelatihan ini adalah staf pengajar FEB UI dan praktisi yang memiliki keahlian mumpuni dalam *financial modeling*. Metode pembelajaran yang digunakan adalah praktik langsung sehingga setelah pelatihan peserta dapat langsung menggunakannya dalam keseharian.

14. Pelatihan Reguler CFA Course

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler CFA Course Angkatan 27. *Chartered Financial Analyst (CFA)* merupakan sertifikasi profesi bidang keuangan dan investasi yang diakui secara internasional. Sertifikasi bergengsi ini dikeluarkan oleh CFA Institute. Para pemegang CFA sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang antara lain dalam manajemen investasi, perusahaan konsultan, *investment bankers*, asuransi, dana pensiun, perbankan dan institusi keuangan lainnya. Permintaan akan penyandang CFA masih sangat tinggi dan semakin banyak pula institusi-institusi yang mensyaratkan para ahlinya untuk memiliki gelar CFA. Dikarenakan tingkat kesulitannya yang relatif tinggi, persiapan menghadapi Ujian CFA menjadi kebutuhan yang penting bagi para CFA Candidates. Dalam kaitan ini, PPA FEB UI mengadakan CFA Course untuk turut serta:

- Mempersiapkan *CFA Candidates* sehingga mampu dan dapat melewati ujian sertifikasi CFA.
- Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu, kompeten, dan memiliki integritas yang tinggi dalam bidang *portofolio management* dan *investment analysis*

Instruktur yang terlibat dalam CFA Course ini terdiri dari staf pengajar FEB UI dan/atau praktisi yang telah menyandang gelar CFA, atau memiliki keahlian di materi tertentu dan bergelar Doktor. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan *active lecturing* dengan membahas soal dan teori.

15. Pelatihan Reguler CIA Review

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler CIA Review Angkatan 26. CIA Review adalah pelatihan yang didesain untuk membantu para peserta mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi internasional bidang audit internal. CIA merupakan sertifikasi bertaraf internasional sebagai pengakuan atas integritas, profesionalisme, dan kompetensi pemegangnya di bidang audit internal. CIA review juga didesain untuk memutakhirkan pengetahuan peserta tentang perkembangan praktik di bidang audit internal. Materi CIA Review mencakup materi ujian yaitu Internal Audit Basics, Internal Audit Practice, dan Internal Audit Knowledge Elements. CIA Review ini melibatkan staf pengajar FEB UI serta praktisi di bidang internal audit yang telah menyandang sertifikasi CIA. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan *active lecturing* dengan membahas *problem set* serta diakhir dilakukan *tryout* untuk melatih peserta sebelum mengikuti ujian CIA.

16. Pelatihan Reguler CFP Review

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler CFP Review Angkatan 10. *Certified Financial Planner (CFP®)* adalah sertifikasi perencana keuangan profesional yang diakui dan paling terkenal di dunia. CFP® diberikan oleh Dewan Standar Perencana Keuangan di Indonesia yang berada di bawah lisensi dari Dewan Standar Perencanaan Keuangan Dunia di Denver, Amerika Serikat. Keunggulan-keunggulan program CFP review di PPA FEB UI adalah: fasilitator/Instruktur berpengalaman dan bersertifikat, sesi latihan komprehensif di setiap pembahasan modul, mendapatkan akses langsung berbasis web pada perhitungan kalkulator perencanaan keuangan, disediakan oleh ZAPfin Planning Institute, serta memperoleh sertifikat keikutsertaan dari PPA FEB UI.

17. Pelatihan Reguler CPMA Review

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler CPMA Review Angkatan 22. Pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam menempuh Ujian *Certified Professional Management Accountant* (CPMA). Ujian CPMA merupakan salah satu ujian untuk mengukur kompetensi dalam bidang akuntansi manajemen dan bidang-bidang lain yang terkait. Ujian CPMA dimaksudkan pula sebagai salah satu strategi pengembangan profesi akuntan manajemen di Indonesia dalam rangka menghadapi arus globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas dalam produk dan jasa termasuk jasa akuntansi. Semua lulusan (pemegang gelar CPMA) akan didaftarkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. Para ahli yang menyandang gelar CPMA mendapatkan pengakuan atas kompetensinya di bidang akuntansi manajemen dan bidang lain yang terkait sehingga mempunyai kualifikasi yang baik sebagai Akuntan Manajemen dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang terkait. Selain itu, para penyandang gelar CPMA menjadi ukuran mutu bagi para stakeholders atas penguasaan bidang ilmu akuntansi manajemen dengan segala aspeknya yang terkait. Kebutuhan masyarakat bisnis akan penyandang gelar CPMA masih sangat tinggi karena ujian sertifikasi CPMA baru diadakan pertama kali di Indonesia pada tahun 2006. Keunggulan-keunggulan program CPMA Review di PPA FEB UI adalah: pendekatan pengajaran dengan pembahasan soal-soal dan konsep, *try out* di akhir pelatihan dan pembahasannya sebagai indikator kesiapan peserta untuk menghadapi ujian CPMA yang sesungguhnya, serta jumlah jam pelatihan mencapai 64 jam, sehingga peserta diharapkan sangat siap menghadapi ujian CPMA. Instruktur pelatihan adalah staf pengajar FEB UI dan praktisi yang telah menyandang gelar CPMA atau ahli dibidangnya.

18. Pelatihan Reguler IdCPA Review

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler IdCPA Review Angkatan 32. Pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam menempuh Ujian CPA (kurikulum baru). Ujian CPA (kurikulum baru) merupakan program pengembangan profesi bagi auditor yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni UU nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, PP nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktek Akuntan Publik, dan Peraturan Asosiasi nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ujian Profesi Akuntan Publik serta mengadopsi persyaratan *Internasional Education Standard (IES)* yang diterbitkan oleh *International Federational of Accountants (IFAC)* dan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta merespon perkembangan profesi, sehingga diharapkan tersedia sumber daya manusia yang diperlukan bagi profesi akuntan publik dengan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Ujian CPA selama ini ditujukan bagi seseorang yang ingin mendapatkan ijin untuk menjadi akuntan publik. Selama ini belum terdapat mekanisme *quality assurance* untuk meningkatkan kompetensi bagi staf Kantor Akuntan Publik (KAP), sementara peran dan fungsi staf KAP tersebut sangat penting. Ujian CPA (kurikulum baru) menjawab kedua kebutuhan tersebut, yaitu menyediakan kualifikasi profesional bagi staf KAP dan bagi yang ingin mendapatkan ijin untuk menjadi akuntan publik. Sertifikasi ini akan meningkatkan kompetensi dan daya saing penyandang gelarnya. Instruktur pelatihan yang terlibat adalah staf pengajar FEB UI dan/atau praktisi yang memiliki sertifikasi CPA atau ahli dibidangnya.

19. Pelatihan Reguler CPSAK Review

Pada Semester I 2017 PPA FEB UI telah menyelenggarakan Pelatihan Reguler CPSAK Review Angkatan 13. CPSAK Review adalah pelatihan yang didesain untuk membantu para peserta mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi PSAK yang diselenggarakan oleh IAI. CPSAK Review juga didesain untuk memutakhirkan pengetahuan peserta tentang standar akuntansi keuangan terbaru yang berlaku di Indonesia. CPSAK Review ini melibatkan staf pengajar FEB UI serta praktisi di bidang akuntansi keuangan yang telah menyandang sertifikasi CPSAK. Metode pembelajaran bersifat *active lecturing* dan pemberian materi oleh instruktur disertai dengan pembahasan soal latihan, selain *pre-test* di awal dan *post-test* di akhir pelatihan.

20. Pemutakhiran Buku Modul Uji Kompetensi Bidang Treasury Level Basic

PPA FEB UI membantu ACI FMA Indonesia melakukan pemutakhiran Buku Modul Uji Kompetensi Bidang *Treasury Level Basic*. Modul ini merupakan acuan untuk menghadapi ujian sertifikasi profesi *treasury* yang diselenggarakan oleh ACI FMA Indonesia. PPA FEB UI juga membantu ACI FMA Indonesia menyusun soal-soal ujian sertifikasi profesi tersebut. Penyusunan modul dan soal mengacu pada KKNl yang berlaku serta pedoman penyusunan soal yang diterbitkan oleh LSPP.

21. Penyusunan POS, Buku Pedoman Akuntansi, Kompilasi Laporan Keuangan, Review Costing, Pendampingan Implementasi ERP, serta Pendampingan Tax Amnesty

Sejak pertengahan tahun lalu s.d. Juni 2017 PPA FEB UI membantu kelompok usaha Grup Saliman melalui berbagai jasa konsultasi, yaitu: menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) untuk area Akuntansi dan Keuangan, melakukan jasa kompilasi laporan keuangan untuk periode tahun 2016, mereview costing atas persediaan dan harga pokok penjualan, melakukan pendampingan proses migrasi data dan *go live* implementasi ERP, serta melakukan pendampingan terbatas penyediaan data-data yang diperlukan untuk pendaftaran *tax amnesty*. Jasa tersebut mencakup lima entitas di bawah kelompok usaha Grup Saliman.

22. Penyusunan Aplikasi dan POS Keuangan

Pada akhir tahun 2016 sd akhir triwulan 2017 PPA FEB UI membantu salah satu partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera dalam menyusun aplikasi serta Prosedur Operasi Standar (POS) keuangan.

23. Penyusunan Financial Model Konsolidasi

Pada akhir tahun 2016 sd awal tahun 2017 PPA FEB UI membantu PT . Indonesia Asahan Alumnum (Persero) untuk menyusun aplikasi *financial model* konsolidasi. Pekerjaan ini mencakup aktivitas: (1) melakukan reviu dan analisis terhadap financial model untuk RJPP yang telah disusun sebelumnya berdasarkan data terakhir; (2) mengembangkan *financial model* laporan konsolidasi sesuai PSAK 65 dengan menjadikan *financial model* untuk RJPP dengan data terakhir sebagai basisnya; (3) menguji dan mendiskusikan hasil uji atas pengembangan *financial model* laporan keuangan konsolidasi sesuai PSAK 65 dengan *counterpart*; serta (4) menyempurnakan *financial model* laporan keuangan konsolidasi menjadi model final.

24. Pendampingan Implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)

Pada awal tahun 2017, PPA FEB UI kembali ditunjuk oleh Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pendampingan implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), untuk durasi kerjasama selama 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan awal 2019. Kerjasama pendampingan implementasi KAKBI periode ini sudah memasuki tahun kelima dan keenam, setelah sebelumnya di tahun 2011-2012 PPA FEB UI membantu BI menyusun KAKBI tersebut. KAKBI merupakan standar akuntansi yang diacu oleh BI dalam menyusun laporan keuangannya sejak tahun 2013. KAKBI juga telah dialihbahasakan dan disosialisasikan kepada komunitas bank sentral regional dan dunia. Pekerjaan ini melibatkan banyak staf pengajar FEB UI, khususnya dari Departemen Akuntansi. Pada periode pendampingan 2017-2018 ini mencakup beberapa aspek. Aspek pertama adalah konsultasi penerapan KAKBI yang mencakup: pendampingan implementasi serta pendampingan penyusunan publikasi dan penelitian empiris tentang penerapan KAKBI. Aspek kedua adalah review terhadap isu pemutakhiran KAKBI yang mencakup review dan/atau pemutakhiran PKAK 06 serta PKAK lainnya (*annual improvement*). Aspek ketiga adalah review standar akuntansi umum yaitu tentang kesesuaian PAKBI dengan KAKBI. Aspek keempat adalah pendampingan sosialisasi dan komunikasi, baik dalam bentuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan di luar BI maupun pelatihan kepada pemangku kepentingan di dalam BI, serta pendampingan penyusunan materi tanggapan perkembangan standar akuntansi bank sentral. Aspek kelima adalah pendampingan Rapat Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI. Aspek terakhir atau aspek keenam adalah review dan penyusunan alat kelengkapan Komite Penyusun KAKBI, yaitu mencakup SOP serta kelengkapan organisasi Komite.

25. **Reviu atas Kajian Finansial Optimalisasi Aset Lahan Palatehan**

Pada periode April sd. Juni 2017 PPA FEB UI telah membantu PT. Peruri Properti untuk melakukan reviu atas kajian finansial optimalisasi aset lahan Palatehan yang dimiliki oleh PT. Peruri sebagai induk PT. Peruri Properti. Reviu mencakup aspek metodologi serta keakuratan perhitungan dalam kajian finansial tersebut. Reviu telah menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kajian finansial optimalisasi aset lahan Palatehan tersebut.

26. **Swakelola Kajian Cost Structure pelayanan Poliklinik dan Administrasi Kesehatan BI oleh YKK BI**

Sejak April 2017 PPA FEB UI membantu Bank Indonesia, khususnya Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) untuk melakukan kajian atas struktur biaya (*cost structure*) pelayanan poliklinik dan administrasi kesehatan BI yang diberikan oleh YKK BI. Pekerjaan mencakup analisis jenis layanan, standar pelayanan minimum, proses bisnis, struktur biaya, serta perbandingan harga layanan yang diberikan oleh YKK-BI. Hasil dari pekerjaan ini adalah daftar layanan dan standar pelayanan minimumnya, struktur biaya, serta rekomendasi pola hubungan keuangan antara BI dan YKK BI terkait layanan poliklinik dan administrasi kesehatan.

27. **Pengembangan PPA FEB UI sebagai CoE**

Pada tahun 2017 PPA FEB UI ditunjuk menjadi salah satu CoE terkait program State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (STAR BPKP). Pada akhir tahun 2016 sd semester I 2017 telah dilakukan pembahasan dan orientasi awal PPA FEB UI sebagai CoE, serta perumusan dan persetujuan proposal kerja sama riset terapan antara PPA FEB UI dan STAR BPKP. Pada pertengahan Juli 2017 akan dilakukan MoU antara BPKP dan UI serta penerbitan SPK sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kerja sama riset terapan tersebut.

1. Kajian Strategi Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia – Departemen IKNB Syariah OJK

Kegiatan penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yaitu untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam mengembangkan dana pensiun syariah di Indonesia, mengetahui potensi dana pensiun syariah di Indonesia, dan mengetahui hambatan/kendala pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, kajian ini menggunakan metode bauran (*mixed methods*) yang menggabungkan metode penelitian kualitatif (dengan instrumen FGD) dan metode penelitian kuantitatif (dengan instrumen survey). Berdasarkan hasil FGD, prospek dana pensiun syariah di Indonesia dianggap sangat bagus, namun tingkat pengetahuan sebagian sebagian besar pengurus dana pensiun mengenai dana pensiun syariah masih terbilang rendah. Sedangkan survey persepsi masyarakat menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan belum memiliki program pensiun, baik syariah maupun konvensional, terutama karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk mengikuti program pensiun tersebut. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, kajian ini merekomendasikan beberapa arah kebijakan dan strategi pengembangan dana pensiun syariah ke depannya.

Dalam jangka pendek, arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bisa dilakukan terutama terkait dengan penguatan fungsi regulasi OJK, pengembangan kelembagaan dana pensiun syariah, peningkatan literasi dana pensiun syariah kepada kelompok prioritas, pengembangan kebijakan insentif langsung, dan pengembangan sinergi dengan regulator/institusi terkait lainnya. Dalam jangka menengah, kebijakan dapat diarahkan untuk menguatkan fungsi koordinasi dan sinergi OJK dengan regulator/institusi terkait, mengembangkan insentif perpajakan, pendalaman pasar modal, penguatan dukungan SDM dan infrastruktur dana pensiun syariah, serta peningkatan literasi dan preferensi dana pensiun syariah kepada kelompok prioritas. Sementara dalam jangka panjang, arah kebijakan strategis terkait erat dengan peningkatan literasi dan preferensi terhadap dana pensiun syariah secara nasional dan pengintegrasian program pensiun syariah dengan sistem jaminan pensiun nasional.

2. Penggunaan Data Alternatif untuk Meningkatkan Akurasi Model Credit Scoring bagi Debitur BPRS – Departemen Perbankan Syariah OJK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perbankan nasional. BPRS menjadi andalan dalam sistem perbankan nasional dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah. Namun, tingkat risiko debitur yang masuk dalam kelompok usaha kecil dan menengah cenderung lebih tinggi dibandingkan debitur korporasi sehingga membuat BPRS memiliki risiko kredit yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan menyebabkan instabilitas dalam sistem perbankan nasional. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menekan tingkat risiko kredit adalah dengan cara membuat sistem *credit scoring* yang akurat dan cocok dengan karakteristik debitur BPRS. Permasalahan utama dari model *credit scoring* yang ada saat ini adalah masih menggunakan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama. Padahal menurut Hyytinen dan Pajarinen (2008), debitur UKM memiliki sifat *information opacity* karena informasi keuangan yang mereka berikan cenderung tidak reliable sehingga membuat model *credit scoring* tidak dapat bekerja dengan baik.

Perkembangan terbaru dalam *credit scoring* mengarah pada penggunaan data alternatif seperti data kualitatif, *mobile prepaid*, *psychometric*, *social data*, dan transaksi *e-commerce* debitur. Data-data tersebut telah diterapkan di beberapa negara dan diklaim mampu meningkatkan akurasi *credit scoring* tradisional dan meningkatkan peluang masyarakat yang *unbanked* untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan. Kajian ini berusaha untuk mengkaji dan mengevaluasi jenis data alternatif yang dapat digunakan dalam konteks BPRS di Indonesia. Selanjutnya, data-data alternatif tersebut akan digunakan untuk menggunakan model *credit scoring* bagi BPRS sehingga membantu BPRS dalam mengelola risiko kredit secara lebih baik.

3. Kajian Optimalisasi Potensi wisata di Kabupaten Pandeglang – Dinas PAriwisata Kabupaten Pandeglang

Pada tahun 2017, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata sebesar Rp 200 Juta atau meningkat 33,3% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. Salah satunya adalah melalui penetapan destinasi wisata yang paling potensial. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi destinasi unggulan (*supply*), telaah pasar potensial (*demand*), telaah literatur, *benchmarking* dan formulasi strategi dalam bentuk Buku Pedoman Pengambilan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pandeglang dan Rekomendasi 10 Destinasi Wisata potensial di Kabupaten Pandeglang. Dalam pelaksanaannya, identifikasi destinasi unggulan dilakukan dengan cara mengunjungi tempat – tempat wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kemudian, telaah pasar direalisasikan dengan melakukan survey persepsi masyarakat mengenai wisata di Kabupaten Pandeglang. *Benchmarking* yang dilakukan ialah dengan mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi serta melakukan audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dengan mempertimbangkan hal – hal diatas, 10 destinasi wisata potensial di Kabupaten Pandeglang yang diajukan oleh peneliti adalah Batu Qur'an, Pemandian Air Panas Cisolong, Gunung Pulosari, Kampung Domba, Pantai Carita, Curug Putri & Curug Gendang, KEK Tanjung Lesung, Kawasan TNUK, Pulau Umang & Oar, dan Pulau Tinjil. Selain rekomendasi 10 objek wisata potensial di Kabupaten Pandeglang, penelitian ini juga mencoba untuk memberikan masukan mengenai strategi umum yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten dalam membangun pariwisatanya. Pertama, pemilihan brand pariwisata Kabupaten Pandeglang yang bukan hanya unik dan menarik, namun juga dapat merepresentasikan konsep pembangunan pariwisata di kabupaten menjadi krusial. Penamaan yang unik dan *ear-catching* sangat perlu dalam rangka mempromosikan wisata Kabupaten Pandeglang, baik kepada wisatawan dalam maupun luar negeri. Studi ini mengusulkan “**PentaGlang**” sebagai *brand* sekaligus konsep pembangunan pariwisata di Kabupaten Pandeglang. PentaGlang sendiri berasal dari kata Pentagon, yang artinya bersisi (bersudut) lima, dan Pandeglang.

4. Kajian Pengembangan Strategis wisata Halal di Kabupaten Pandeglang – Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi faktor permintaan wisata halal di Pandeglang, menganalisis kesiapan faktor penawaran destinasi wisata Pandeglang, serta menghasilkan strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata halal khas Pandeglang yang sesuai dengan potensi dan karakteristik kedaerahan serta menggunakan sebanyak mungkin potensi dan sumber daya lokal. Hasil yang didapat dari penelitian ini, untuk alasan berwisata (permintaan) responden penelitian ini, diketahui bahwa pencapaian dan kebersamaan adalah alasan utama berwisata, kemudian dilanjutkan dengan petualangan, pengetahuan baru, melarikan diri dari rutinitas dan untuk olahraga. Sedangkan daya tarik utama (penawaran) dari objek wisata adalah wisata alam, wisata budaya, wisata aktivitas, wisata modern dan wisata belanja dan kuliner. Dengan demikian Pandeglang memiliki modal yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan berwisata, alam yang indah, bermacam aktivitas wisata, budaya yang menarik dan keramahtamahan lokal yang bernuansa religi.

Strategi kunjungan wisata di Pandeglang dapat dibagi antara tiga *main attraction* yaitu, (i) **Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)**, dengan *hinterland* Wisata Pulau Umang, pulau Peucang, pulau Panaitan pulau Oar, Wisata kawasan konservasi Baduy dan Wisata trekking dan menyusuri sungai, (ii) **KEK Tanjung Lesung**, dengan *hinterland*, Wisata Pulau Liyungan, pulau Badul, Wisata Budaya Kampung Cikadu, dan (iii) **Pantai Carita – Anak Krakatau (wisata vulkanik)**, dengan *hinterland*: Wisata Pegunungan, curug dan pemandian air panas (Gunung Pulosari, curug Putri, Curug Ciajen Kembar, Curug Gendang, Pemandian Air Panas Cisolong), Wisata kota (city tour) ke Kampung Domba, curug, CAS Waterpark dan wisata kuliner Pandeglang. Sedangkan untuk strategi, pemerintah daerah diharapkan segera membuat fokus strategi terarah untuk tiga aspek yaitu (i) kebijakan, (ii) infrastruktur dan strategi *marketing* wisata halal sebagaimana dirinci diatas. Rekomendasi operasional untuk menjalankan strategi tersebut adalah dengan menitikberatkan pada penguatan kapabilitas SDM internal, pembentukan *task force* dan evaluasi kinerja terukur.

1. Survei Neraca Rumah Tangga

Survei yg dilakukam untuk Bank Indonesia untuk menganalisis perilaku keuangan rumah tangga melalui laporan keuangan serta *coping strategies* mereka ketika ada masalah keuangan. Data SNRT ini digunakan sbg salah satu *surveillance system* makroprudensial oleh Bank Indonesia.

2. Survei Pemilih Pilkada DKI Tahap Kedua

Pilkada Jakarta Tahap 2 memberikan banyak pertanyaan baik dari kandidat yang dipilih maupun faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari karakteristik pemilih maupun dari luar yang bersifat eksternal. Survei ini ingin menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana faktor yang bersifat inheren berinteraksi dengan faktor eksternal.

3. Kajian Infrastruktur Permukiman sekitar Pos Lintas Batas Negara

Kajian Sosial Ekonomi Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perbatasan adl kerja sama antara LD FEBUI dengan Subdit Kawasan Permukiman Khusus, Direktorat Cipta Karya, Kemen PUPR.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk 1) mempelajari persepsi masyarakat terhadap keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan program Pengembangan Infrastruktur Permukiman dasar; 2) menangkap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur yg dibutuhkan; serta 3) mengidentifikasi potensi ekonomi yg dpt memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Kajian dilakukan melalui pendekatan kualitatif & kuantitatif di 5 wilayah perbatasan, yaitu Badau (Kalbar), Aruk (Kalbar), Motamasin (NTT), Wini (NTT) dan Skouw (Papua).

4. Development of Indonesia Tobacco Control Research Network.

Kolaborasi dg John Hopskin School of Public Health. Mengkoordinasi pelaksanaan *research grant making* dan dissemination on tobacco control topics.

5. Tobacco Tax Research and Advocacy

Berkolaborasi dengan Southeast Asian Tobacco Control Alliance. Melakukan *action research* on tobacco tax reformation. Tahun ini difokuskan untuk membuat *research on comparative tobacco excise law* yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan amandemen UU Cukai di Indonesia.

6. Pemetaan Program G2P di Indonesia

Kajian ini bertujuan untuk memetakan program-program dengan skema G2P di tingkat nasional di Indonesia. Ruang lingkup program yang akan dipetakan adalah program yang diberikan pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Program yang ditelusuri tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga termasuk bantuan berupa barang, dan subsidi harga. Sebanyak 89 program dengan skema G2P di berbagai Kementerian / Lembaga telah teridentifikasi. Kajian lebih mendalam dilakukan terhadap 25 program terpilih yang memiliki *coverage* atau anggaran terbesar. Kajian yang dilakukan meliputi peraturan terkait program, sasaran program, mekanisme penentuan penerima bantuan / program, mekanisme penyaluran, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi program.

7. Long-Term Care

As the fastest-aging region in the world, Asia and the Pacific are at the forefront of one of the most important global demographic trends. In 2012, 11% of the population in Asia was aged 60 years or above, and by 2050 this is expected to increase to 24% or roughly 1.26 billion people. At the same time, traditional family support systems are weakening, due in part to increased migration and expanded female labor market participation. Thus, there is a growing need to establish and finance alternatives to the traditional practice of family members caring for their elderly loved ones. This study aims to analyze and discuss the future of long-term care that demands better planning, more financing, more and better-qualified human resources. Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo is assigned by ADB to do the diagnostic studies along with Thailand, Mongolia, Vietnam, Sri Lanka and Tonga.

8. Survei Dampak Implementasi Teknologi Pembungaan Awal untuk Tanaman Mangga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat

Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi program PRISMA yaitu implementasi EFT atas pohon-pohon mangga di Jawa Timur dan NTB. Manfaat survei ini adalah:

- o Mengumpulkan informasi tentang produksi mangga dan pendapatan para petani mangga yang menerapkan EFT dibandingkan dengan petani-petani yang tidak menerapkan EFT.
- o Mengumpulkan informasi tentang produksi dan pendapatan petani mangga sebelum program dilaksanakan.
- o Untuk melihat berapa banyak petani yang menerima manfaat dari program dalam hal peningkatan pendapatan.
- o Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi PRISMA dalam hal dampak dan skala implementasi EFT bagi pendapatan petani mangga, berdasarkan informasi-informasi di atas. Selain itu, informasi tersebut juga berguna untuk meningkatkan strategi intervensi mangga.

Pengumpulan data untuk studi ini akan dilakukan di dua provinsi: (A) Jawa Timur, dan (B) Nusa Tenggara Barat (NTB). Studi ini akan melibatkan sebanyak 570 responden, dengan rincian 470 responden di Jawa Timur dan 100 responden di NTB.

1. Estimating the Demand for Social Infrastructure Investment in Indonesia

Client : JICA

Period : April–July 2017

This is an ongoing project funded by Japan International Cooperation Agency (JICA). The study aims to provide an estimation of investment demand for Indonesia's social infrastructure until 2030 at the national level. It will be the first study to estimate the investment needs in social infrastructure, which covers education, health, housing, and government. It will also provide policy recommendation for Indonesia to fill the projected gap of social infrastructure investment by two approaches. The first is macro approach adapted from Fay and Yepes' framework (2003). This study relies on the historical, provincial relationship between social infrastructure stocks and key provincial economic indicators. Based on this relation, this study forecasts the social infrastructure needs in order to meet the dynamics of economic growth and demographic trend during 2016–2030. The second is micro approach which calculates the needs based on projected number of population.

The preliminary results show that Indonesia needs USD 452.1–465.2 billion to fulfill its social infrastructure needs over 2016–2030, accounting for 2.32–2.34% of annual projected GDP. In total, annual investment demand accounts for approximately 18% of government expenditure. Lack of investment on social infrastructure will have a future consequence on national competitiveness. In total, annual investment demand accounts for approximately 80% of subsidy and 24% of tax revenue. It is also important to consider the financing issues in anticipation of economic growth and population dynamics, which involve private investment and multilevel financing across government levels.

2. Indonesia and the Global Value Chain: The Utilization of Trans-Pacific Partnership

Period :April–July 2017

In October 26th 2015 the President of Republic of Indonesia, H.E. Joko Widodo, in his official bilateral meeting with the President of the United States of America, H.E. Barack Obama, stated that Indonesia ‘intended to join’ the Trans-Pacific Partnership (TPP). Indonesia is the country chair for the Trade Negotiating Committee (TNC) of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). It has the largest economic and population size in Southeast Asia, is a founding member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with a forecasted rising economic growth, and one of the most promising emerging countries in Southeast Asia. Its intention to join the TPP is therefore interesting to observe and makes an appealing research material. Under the research institute network for TPP, LPEM FEB UI collaborates with CSIS Indonesia to analyze the motivations underlying Indonesia’s interest in the Trans-Pacific cooperation. It is interesting to note that during the TPP initial process, Indonesia was decided to be an outsider and focused only on regional economic integration process, especially the ASEAN Economic Community (AEC).

LPEM takes the value chains as one of the three themes of the TPP study. The perspectives of trade and networks are adopted in the value chain approach. First, this study estimated the trade diversion and trade creation impact on Indonesia’s exports and imports. Second, this study produced a basic estimation of the global value chains (GVCs) in the scenarios of Indonesia joining and not joining the TPP. It employed and modified several methods to calculate these scenarios. The study then combined the trade diversion and trade creation calculations to explore which Indonesian products could potentially be affected by the TPP in both “in” and “out” scenarios. Using trade impact evaluation and global value chains analyses, this study found that the net cost of being outsider is higher than that of joining as a member of the TPP.

3. The Survey to Assess Broadband Network Potentials for Connectivity in Indonesia

Client : LIRNE Asia

Period : March–August 2017

Funded by LIRNE Asia, the ongoing project aims to discover the used capacity of internet users at household level in 34 provinces of Indonesia. Using LPEM's list of villages in Indonesia, the study involves 1200 households from various income levels obtained from Susenas 2015 data by systematic random sampling. This method enabled the village samples to be relatively equally distributed, allowing selected villages to represent the population. The survey employed Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) to reduce non-sampling errors in data measurement.

4. Mapping Persons with Disabilities in Indonesian Labor Market

Client : ILO

Period : June–August 2016

The empowerment of Persons with Disabilities (PWD) has recently attracted the attention of the Indonesian government and NGOs. Several initiatives have been made to improve PWD's lives and comprehend their rights, including in economic activities. This study aims to map PWD in Indonesian labor market. Specifically, it analyzes the characteristics of employed and unemployed PWD. The study explores the 2016 Labor Force Survey (Sakernas) data as well as other latest data sources. The results show that PWD prevalence in the eastern parts of Indonesia is higher than that in the western regions. It was also found that PWD faces disadvantages in labor participation, paid employment rate, and wage level compared to Persons Without Disabilities (PWOD). Summary of this study can be viewed on <http://www.lpem.org/menuju-pasar-kerja-yang-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>

5. Mapping of Medical Device Market in Indonesia

**Client : Directorate General of Pharmacy
and Medical Devices, Ministry of Health of Republic of Indonesia**

Period : July–November 2016

This is a collaboration research conducted in 2016 between LPEM FEB UI with Directorate General of Pharmacy and Medical Devices, Ministry of Health of Republic of Indonesia. The study aims to map the market potentials for medical devices in Indonesia in order to form the right policies to support the development of medical device market. According to the E-Purchasing and E-Tendering system, production of medical devices in Indonesia amounted to IDR 16.9 trillion in 2016 with rubber gloves being the most widely produced. Meanwhile, total needs for medical devices in 2016 reached IDR 20.8 trillion. It is estimated that the needs for medical devices will keep growing as the National Health Insurance program is being implemented. Today, medical devices products in Indonesia are still dominated by imported goods with a total import of IDR 17.9 trillion versus total export of IDR 9.06 trillion in 2015.

This condition calls for appropriate strategies to develop the medical device market, such as by providing fiscal incentives in the form of conditional tax reduction for medical device manufacturers that meet certain criteria, or products purchasing guaranteed by the government for manufacturers of innovative medical devices with certain criteria. Additionally, human resource capacity involved in the manufacturing of medical devices should be improved. These strategies require not only the efforts of the Ministry of Health, but also cooperation of related institutions, such as the Ministry of Finance, Ministry of Trade, Ministry of Industry, and BKPM.

6. Economic Impact of Jakarta Flood on Society

Client : ANU

Period : March 2017–January 2018

Funded by the Australian National University (ANU), LPEM FEB UI researchers engage in an ongoing survey as part of impact assessment of Jakarta flood. As the population of Jakarta has long suffered from annual flood, this study is an attempt to shed some light on how flood affects the welfare of society. A provincial representative survey involving 500 people was made and the data were analyzed through descriptive and inferential statistics. The results revealed that flood has led to direct economic losses, as well as affect indirect economic activities such as school and work. Low-income households were found to be suffering more than other income classes.

7. Green Knowledge Capture and Dissemination on Green Budgeting

Client : MCA

Period : September 2015–September 2017

LPEM FEB UI receives a two-year grant from the Millennium Challenge Account (MCA) on Green Budgeting comprising four provinces: NTB, NTT, Jambi, and West Sulawesi. Green Knowledge Capture and Dissemination on Green Budgeting aims to internalize considerations over greenhouse gas emission into local planning and budgeting and improve the programming, financial planning, and budgeting practices at subnational level. The project identifies green budgeting practices to further initiate the practices at provincial level and endorse green budgeting implementation through deep study, observations, focus group discussions, capacity building, and construction of indicators to measure the performance of green budgeting at subnational level.

8. Study of Ideal Funding Model for Regional-Owned Enterprises (BUMD) in Managing Indonesia Participating Interest (IPI)

Client : Risk Management and Tax Division, SKK Migas

Period : September–December 2016

This study aims to formulate an ideal funding model for Regional-Owned Enterprises (BUMD) in managing the 10% Participating Interest (PI) while taking into account the main criterion and initial objective of the PI: improving people's welfare in the region. Additionally, the funding scheme must also meet several provisions, such as no foreign involvement, no ownership pledging, and no ownership sharing. The study concludes that in the implementation, PI takeover by the government is not without its problems, which include 1) limited financial capacity of the region preventing it from financing the PI for oil-and-gas BUMD, especially PI funding for new working area for oil and gas; and 2) incomplete (not detailed and unclear) regulation for establishing the 10% PI. This study offers three alternative financing schemes for PI, i.e., capital participation, loan, and ownership sharing. The first alternative is in the form of capital participation (between producing regency/city and province, as well as between provinces by including several regions)—this option is easy to perform provided there is a strong commitment from the regions (e.g., PT BSP in Riau). This option is highly feasible to implement if the PI offered is for old wells. The second alternative takes the form of loan, including loan from KKKS, central government, and loan to banking institution (consortium of BPD, consortium of BUMN, and national private bank). Loans to KKKS are ideal if the Working Area is a new well that requires substantial cost. Loan to central government (PT SMI) is relatively smaller, although where possible PT SMI can potentially provide loans according to business customs depending on the level of risk.

Loans to banks (regional banks, state banks, national private banks), especially where the PI is a long-established Working Area with proven production, are relatively easier to perform and come with clear risk and relatively quick process if they are conducted B2B. The problem is when banks require/ask for collateral when providing loans, as it is widely known that BUMD are prohibited from providing collateral in the form of PI. As the third alternative, sharing of ownership can be performed by BUMD from different regions, BUMD and BUMN, and BUMD and private sector. By sharing the ownership, participating parties also share the risks faced in the business. It is an alternative when the previous options are impossible to perform. The variety of options also allow BUMD to keep learning to manage the company in a good and professional manner in order to reach autonomy in oil and gas industry without putting aside the philosophical purpose of PI.

9. Feasibility Study on the Establishment of Sovereign Wealth Fund (SWF) in Indonesia

Client : UNDP Indonesia

Period : April – September 2016

This study aims to identify and map the feasibility of establishing SWF at the sub-national, provincial, and regency/city levels, based on the fiscal capacity and capability of each region. Furthermore, this study also includes analysis from the regulatory aspects and assessment of the options of institutional form for SWF that can be established by the regional government within the appropriate institutional framework used in Indonesia. At the end, the case study in Bojonegoro is to be presented as an example of the best practice of a regional government that sought the establishment of a SWF.

In an effort to optimize the positive impact of the existence of natural resources, the establishment of SWF by regions, provinces and districts / cities can be one solution to avoid the "curse" of the existence of natural resources in addition to optimizing its utilization, especially for future generations.

The results of calculation and evaluation simulation of surplus, most regions possess a structural surplus and few of them have a surplus cycle. This means that most of the areas that can be considered as feasible should establish the SWF with the purpose of saving or investment. Among the options of the SWF fund management form, the current form of reserve fund can be considered as the appropriate institutional form in managing the fund that can meet the current regulatory framework as well as fulfilling the objective of SWF for saving. However, this type of fund causes the use of this fund should take into account the main objectives of the SWF itself, especially the principle of perpetuity of this type of funds so that the arrangements in terms of utilization should be considerably strict.

10. United States-Indonesia Partnership for South-South and Triangular Cooperation (SSTC) Component 1 (USIP 1)

Client : USAID/Indonesia, National Coordination Team for Indonesia SSTC

Period : March 2016 – March 2020

LPEM FEB UI is trusted to serve as the contractor for the United States-Indonesia Partnership for South-South and Triangular Cooperation Component I (USIP I), a partnership between the governments of Indonesia and United States to strengthen Government of Indonesia (GOI)'s capacity in providing development cooperation that is strategic, effective, and results-delivering in third countries. The initiative coincides with increasing GOI's commitment in SSTC, spearheaded by the National Coordination Team (NCT) which comprises the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of National Development Planning/Bappenas, Ministry of Finance, and Ministry of State Secretariat. The current partnership with USAID goes hand in hand with GOI's SSTC grand design phase 2015-2019 which aims for the strengthening and expansion of SSTC by enhancing the involvement of all stakeholders, including the private sector, NGOs, and universities.

LPEM as the USIP I Center supports NCT's activities in 2016-2020. During the period, USIP I Center will bridge the coordination both internally among ministries in the NCT as well as with other stakeholders; enhance the sustainability and scope of SSTC pilot projects; and capture and adapt the lesson-learned of SSTC activities through collaboration with relevant partners. These objectives are translated into various kinds of programs, e.g., consultation on SSTC policy and institutional framework, support for SSTC programs to third countries, and capacity building for the NCT and SSTC implementing institutions.

One of USIP I flagship programs is development of Country Partnership Strategy (CPS), a document that will guide the provision of Indonesia's development assistance to a given country. In May this year, LPEM's USIP I team conducted a preliminary visit to Timor-Leste as part of CPS development for the country, which will be followed by a full-fledged needs assessment mission in September or October and the writing of the strategy in the coming years.